BUPATI MUSI BANYUASIN

Sekayu, 30 Desember 2022
Kepada
Yth. 1.Ketua DPRD Kabupaten Muba
2.Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba
Di
MUSI BANYUASIN

SURAT EDARAN
NOMOR : B-050/1641/SETDA/2022

TENTANG
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Menjelang berakhirnya periode perencanaan jangka panjang dan jangka menengah baik di tingkat nasional maupun daerah, serta kekosongan perencanaan akibat akan berakhirnya masa jabatan beberapa kepala daerah pada tahun 2023 dan persiapan pilkada serentak tahun 2024 menjadikan tahun 2023-2025 sebagai agenda strategis perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Agenda strategis perencanaan ini akan dilaksanakan mulai dari penyusunan RPJPD 2025-2045 yang didahului oleh evaluasi terhadap hasil RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai pijakan dasar penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 kemudian penyusunan rancangan awal RPJPD, Musrenbang RPJPD dan Penetapan RPJPD Kab. Muba Tahun 2025-2045. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu RPJMD 2025-2030 dan Penyusunan dokumen jangka pendek yaitu RKPD. Sebagai tahapan awal untuk penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek yaitu RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 akan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam **penyusunan Renja-PD Tahun 2024** **wajib mempedomani** RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2014 **serta memperhatikan**:
   - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin;
   - Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024;
   - Prioritas Daerah Tahun 2024;
   - Sistematika penulisan sesuai ketentuan Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Sebagai masukan penyusunan Rancangan Renja-PD, **Perangkat Daerah wajib memverifikasi**:
   - Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
   - Pokok- Pokok Pikiran DPRD berdasarkan risalah Rapat Paripurna Hasil Reses.
3. Rangkaian proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) **menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** yang dapat diakses melalui alamat website : *sipd-ri.kemendagri.go.id*;
4. Agar mematuhi tahapan dan jadwal penyusunan RKPD Tahun 2024.

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda Prov. Sumsel;
2. Pimpinan DPRD Kab. Muba;
3. Pertinggal.

Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Lk. I Kel. Serasan Jaya Sekayu, Kab. Musi Banyuasin
Telp/Fax. (0714) 321013 - 321064, Kode Pos 30711
Website : www.mubakab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1 : Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin
Nomor : B-050/1641/SETDA/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyusun RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang merupakan RKPD tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026. Implementasi dari kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan sasaran pembangunan thaun 2024 dibutuhkan sinergitas dan dukungan utamanya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan hal tersebut, berikut disampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani:
   1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
   3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
   5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
   6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
   8) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026
   9) Dokumen perencanaan pembangunan sektoral di tingkat nasional dan daerah serta rencana tata ruang dan wilayah.

b. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 diarahkan pada **"Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan".**

c. Memperhatikan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian angka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Musi Banyuasin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

d. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Pj. Bupati Musi Banyuasin; pokok-pokok pikiran DPRD, Prioritas Daerah dan usulan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

e. Rencana program/kegiatan/subkegiatan berikut pengalokasian pagu indikatif disusun berbasis kinerja dan money follow program priority, memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur, terpadu lintas sektor serta melakukan upaya terobosan baru yang efektif untuk pencapaian target indikator sasaran, penyelesaian permasalah dan isu-isu strategis pembangunan termasuk implementasi Program Prioritas serta disusun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

f. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya peningkatan peran swasta melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (Corporate Social Responsibility/CSR) dan kerja sama dengan Lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan.

II. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penentuan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024. Adapun capaian indikator makro pembangunan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Dampak pandemi global Covid 19 menurunkan aktivitas ekonomi dunia sejak tahun 2020 telah mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi di banyak wilayah di Indonesia. Namun berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta adaptasi *new normal* telah memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia secara umum. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia secara nasional mampu bertumbuh sebesar 3,69% setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar 2,07%. Provinsi Sumatera Selatan mampu bertumbuh sebesar 3,58% pada tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya terkontraksi sebesar 0,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pemulihan ekonomi di berbagai sektor seiring dengan terkendalinya wabah Covid 19 secara nasional.

Sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, kondisi perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 terdampak signifikan sehingga mengalami kontraksi sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 berangsur pulih dan beradaptasi sehingga mampu bertumbuh sebesar 3,42%, walaupun laju pertumbuhan ini masih lebih lambat jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai pertumbuhan sebesar 4,57%. Pada tahun 2021, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mampu bertumbuh secara ekonomi dengan cukup signifikan (mengalami *rebound*) walaupun belum mampu menyamai tingkat pertumbuhan di masa sebelum pandemi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (%)

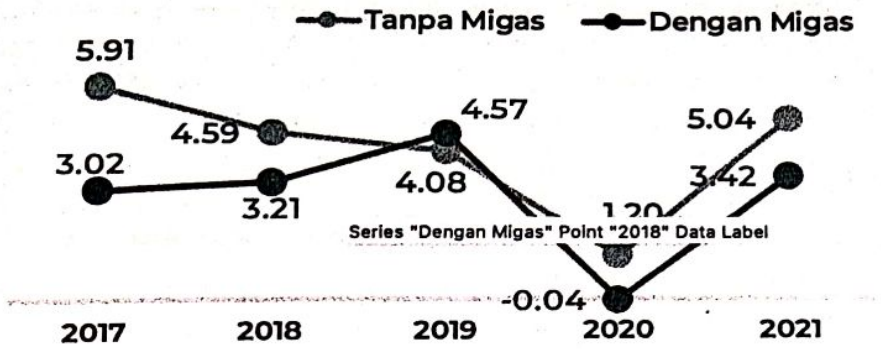

Sumber: BPS, 2022

PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah di suatu wilayah dapat diketahui dari distribusi nilai
PDRB ADHB di wilayah tersebut. Kategori – kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan
nilai PDRB ADHB Kabupaten Musi Banyuasin menurut lapangan usaha (lihat Gambar 4.4) terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode lima tahun (2017 – 2021) didominasi oleh lima lapangan yang usaha yang sama (tidak ada perubahan signifikan setiap tahunnya seperti gambar di bawah ini.

Distribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Dominan
Kabupaten Muba Tahun 2017 – 2021

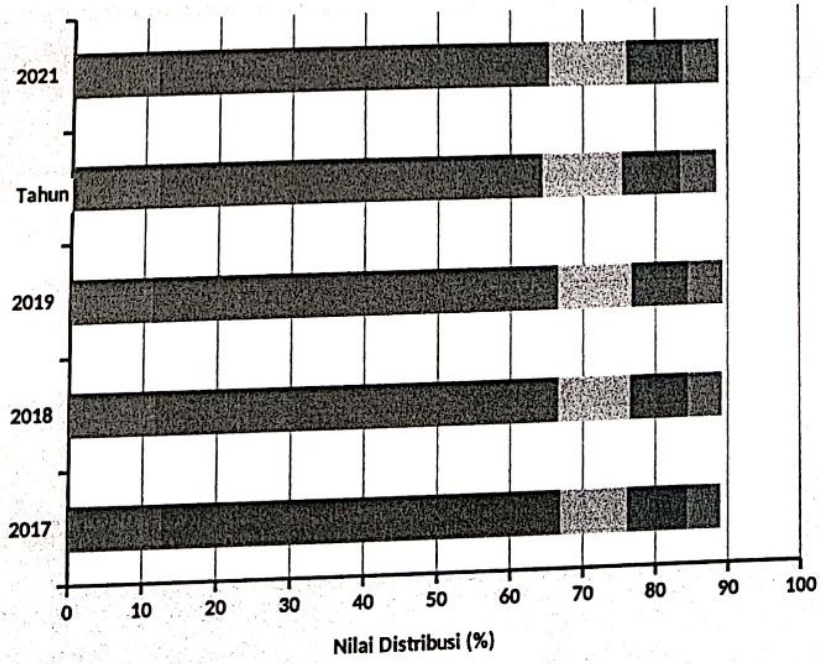

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Sumber : BPS, Muba dalam Angka, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara peranan distribusi lapangan usaha dalam periode lima tahun tidak mengalami perubahan. Selaras dengan nilai PDRB ADH Berlaku tertinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode yang sama (Gambar 4.4), lima lapangan usaha yang paling berperan dalam struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin secara berurutan adalah (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (3) Industri Pengolahan, (4) Konstruksi dan (5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Namun demikian, secara rinci besaran peranan (distribusi) kelima lapangan usaha dominan tersebut masing – masing mengalami sedikit perubahan dalam periode lima tahun tersebut. Distribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun dari 12,74% di tahun 2017 menjadi 11,69% pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2020 ketika pandemi Covid 19 bermula, lapangan usaha ini mampu berperan sebanyak 12%, naik dari distribusi tahun sebelumnya sebesar 11,19%.

Distribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun dari 54,18% pada tahun 2017 menjadi 53,67% pada tahun 2021. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini peranannya turun menjadi 52,43% dibandingkan distribusi tahun 2019 yang menyentuh 55,36% (tertinggi dalam periode lima tahun terakhir).

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan menunjukkan tren yang positif dalam lima tahun terakhir. Distribusi Industri Pengolahan pada tahun 2017 adalah sebesar 9,19% dan menjadi 10,69% pada tahun 2021. Di masa pandemi tahun 2020, Industri Pengolahan meningkat perannya menjadi 10,95% (tertinggi dalam periode lima tahun terakhir) dan sedikit menurun pada tahun 2021.

Peranan lapangan usaha Konstruksi dalam lima tahun terakhir cenderung menurun, dari 8,32% pada tahun 2017 menjadi 7,85% pada tahun 2021. Konstruksi di tahun 2020 distribusinya sedikit meningkat menjadi 8,09% dibanding tahun sebelumnya dengan nilai distribusi 7,79%.

Peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam periode lima tahun terakhir cenderung meningkat dikisaran 4,6% hingga 5%.

2) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar Kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021

PDRB ADHK

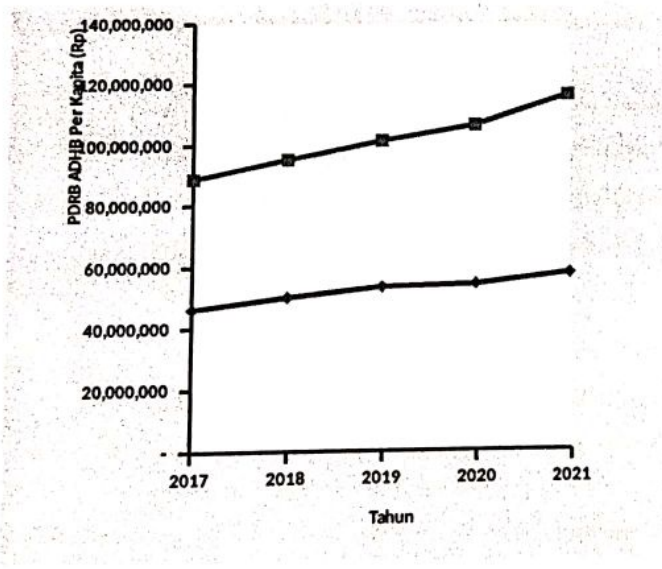

PDRB ADHB

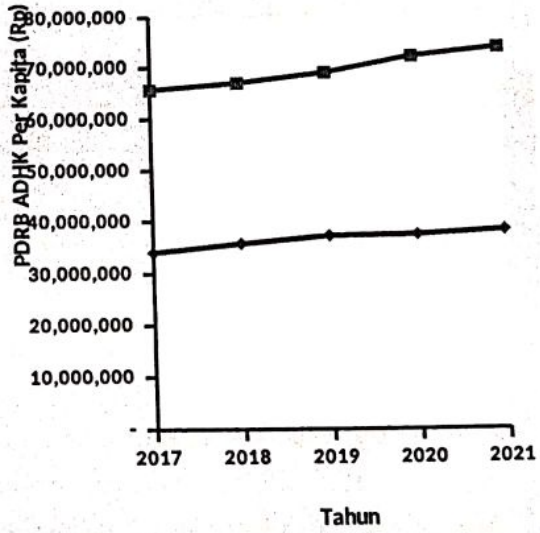

S

umber : BPS, Muba dalam Angka, 2022

Dalam perkembangannya, PDRB ADHB per kapita dan PDRB ADHK per kapita periode tahun 2017 s.d. tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin serta Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat setiap tahunnya. PDRB ADHB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 naik 30,23% dibandingkan tahun 2017, sedangkan PDRB ADHK per kapita nya naik 12,06%. Kenaikan tersebut selaras dengan peningkatan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Selatan sebesar 24,12% dan PDRB ADHK per kapita nya 12,08% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2017.

Dipindai dengan CamScanner

PDRB ADHB per kapita dan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Musi Banyuasin selalu lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, jika dibandingkan dalam lima tahun, *gap* untuk PDRB ADHB per kapita semakin melebar sebanyak 36,87% dan *gap* untuk PDRB ADHK per kapita semakin melebar sebanyak 12,05%.

3) **Angka Kemiskinan**

Salah satu permasalahan yang selama ini terjadi pada penduduk miskin dan dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas bagi penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada, relatif kecil sekali. Sehingga mendorong mereka untuk menjadi buruh tani/perkebunan atau pekerja kasar di luar pertanian/perkebunan.

Namun, karena bekerja di pertanian/perkebunan berdasarkan musiman, kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin, Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*selfemployed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya, di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar saat ini membuat tingkat upah mereka menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.

Sementara itu, mereka juga tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat. Permasalahan selanjutnya adalah tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah mereka karena harus membantu orangtua mereka mencari nafkah tambahan sehingga mengakibatkan banyak penduduk miskin tidak mempunyai ketrampilan atau *skills* dan pendidikan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

❖**Menjadi *Coordination Hub* Penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan tugas:**

1. Memastikan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program daerah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
2. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan ekstrem dari Pemerintah Daerah dan Desa dengan program Kementerian/Lembaga untuk dapat diimplementasikan secara **konvergen** di tingkat desa dan menjangkau rumah tangga sasaran.
3. Melibatkan unsur non-pemerintah (Pihak Swasta. Perguruan Tinggi. LSM dan unsur lainnya) dan memfasilitasi sumberdaya non-pemerintah (dana. inovasi dan lainnya) untuk dapat berperan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah
4. Bersama aparat kecamatan/desa. fasilitator lokal dan perguruan tinggi melakukan monitoring pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.

❖**Pemerintah Daerah memegang peran yang sangat penting, terutama dalam tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan** pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

❖**TKPK diharapkan sebagai motor upaya konvergensi pemanfaatan anggaran dan konsolidasi program/kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem** yang dilakukan Pemerintah Pusat. Daerah. dan unsur non-pemerintah

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai berikut:

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat
   - Memastikan kelompok ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial (bansos dan jamsos);
   - Meningkatkan koordinasi K/L dan Pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah;
   - Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan);
   - Melibatkan komunitas , Lembaga non pemerintah dan swasta;
   - Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
   - Melalui peningkatan pendapatan/akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar;
   - Melalui peningkatan kapasitas SDM;
   - Melalui peningkatan kapasitas UMKM;
   - Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
   - Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar;
   - Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
   - Mendorong konvergensi anggaran;
   - Mendorong konsolidasi program;
   - Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah dengan melakukan perbaikan Data baik Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga yang menjadi dasar perencanaan pembangunan agar program pemerintah tepat sasaran dan dapat menurunkan angka kemiskinan Upaya ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Musi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Banyuasin secara signifikan.

Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 – 2022

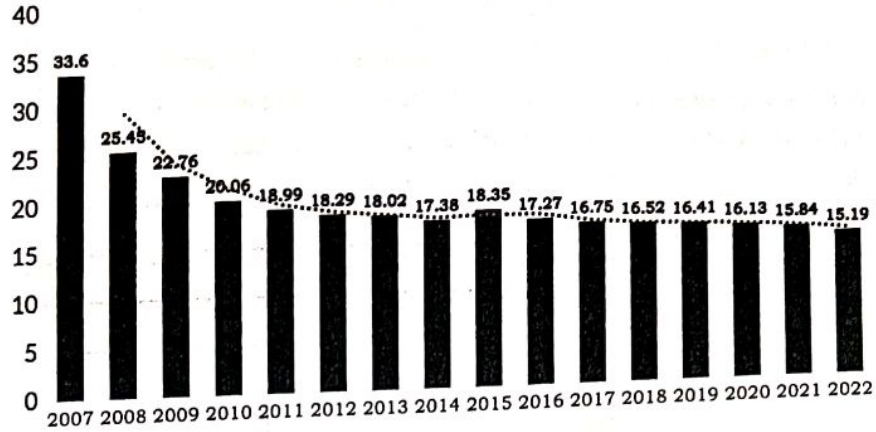

Sumber : BPS, 2022

Selama kurun waktu 16 tahun terakhir (tahun 2007-2022) tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,35% dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,38%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan masih sebesar 33,60% lalu mampu diturunkan menjadi 16,13% pada tahun 2020 atau turun sebesar 17,47%. Dan pada tahun 2022, Kembali mengalami penurunan sebesar 0,65% menjadi 15,19%.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan pembangunan daerah dengan kondisi pandemi covid-19. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin tetap konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan. Patut menjadi perhatian adalah jumlah penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam 19 tahun terakhir. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 36,39%. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15,19% yang artinya Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 21,22% tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Muba dan Sumsel Tahun 2015-2022

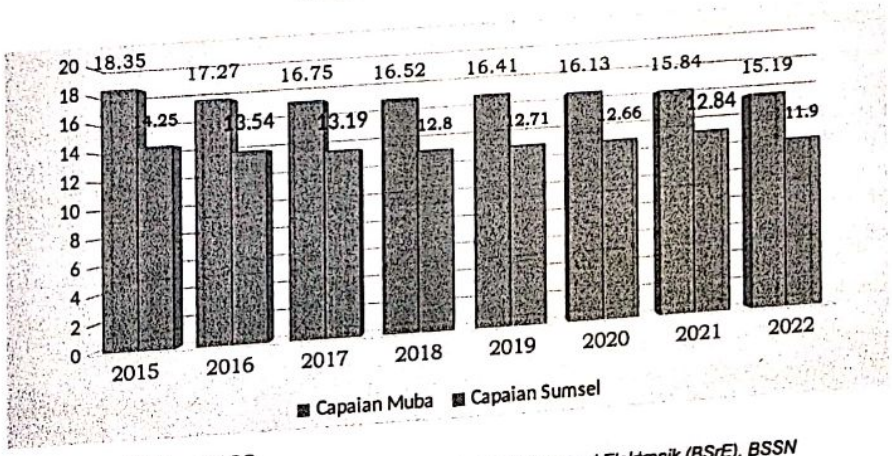

Sumber : BPS, 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin juga lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021 dan 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15,84% dan 15,19% diatas Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 12,84% dan 11,9%.

Upaya penurunan tingkat kemiskinan memang menghadapi kendala yang tidak ringan. Kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2022, kenaikan harga bahan pokok sedangkan disisi lain belum stabilnya harga komoditas utama Kabupaten Musi Banyuasin seperti karet dan sawit, yang sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya dari komoditas tersebut sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Disamping itu juga disebabkan masih tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	GK (Rupiah/Kapita/Bulan)				Laju kenaikan GK	
		2019	2020	2021	2022	2022	2021
1	Prabumulih	541,648	569,769	592,209	623,429	31,220	22,440
2	Palembang	521,489	548,563	567,517	597,136	29,619	18,954
3	**Musi Banyuasin**	**486,476**	**519,797**	**537,774**	**566,393**	**28,619**	**17,977**
4	Musi Rawas Utara	470,485	504,598	532,273	565,070	32,797	27,675
5	Lubuk Linggau	477,756	495,213	516,762	541,784	25,022	21,549
6	Musi Rawas	437,854	467,766	493,675	524,110	30,435	25,909
7	Ogan Ilir	433,616	469,746	492,536	523,864	31,328	22,790
8	Lahat	428,309	457,569	485,141	513,085	27,944	27,572
9	Ogan Komering Ulu	428,200	457,452	481,139	511,887	30,748	23,687
10	Banyuasin	397,496	429,816	445,088	477,393	32,305	15,272
11	Pali	388,208	412,236	435,379	458,746	23,367	23,143
12	Muara Enim	367,761	390,342	405,782	426,216	20,434	15,440
13	Ogan Komering Ilir	347,121	375,837	393,239	416,417	23,178	17,402
14	Oku Timur	321,629	343,601	362,446	383,463	21,017	18,845
15	Empat Lawang	315,699	341,007	360,377	384,199	23,822	19,370
16	Oku Selatan	319,333	341,148	359,858	379,854	19,996	18,710
17	Pagar Alam	328,745	342,738	356,287	370,417	14,130	13,549

Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan Kab. Muba sebesar Rp. 566.393,- atau tertinggi jika dibandingkan 13 Kabupaten di Sumatera Selatan. Garis kemiskinan Kab. Muba pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar (Rp. 28.619,-) apabila dibandingkan dengan kenaikan Garis kemiskinan pada tahun 2021 (yang hanya Rp. 17.977). Hal ini diasumsikan karena adanya kenaikan angka inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada bulan September kemarin dan juga ditambah dengan banyaknya kebutuhan sehari-hari Rumah Tangga yang masih dipenuhi dari luar kabupaten.

4) **Indeks Gini**

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi Indeks Gini bernilai 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

(nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Perbandingan Indeks Gini
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 - 2021

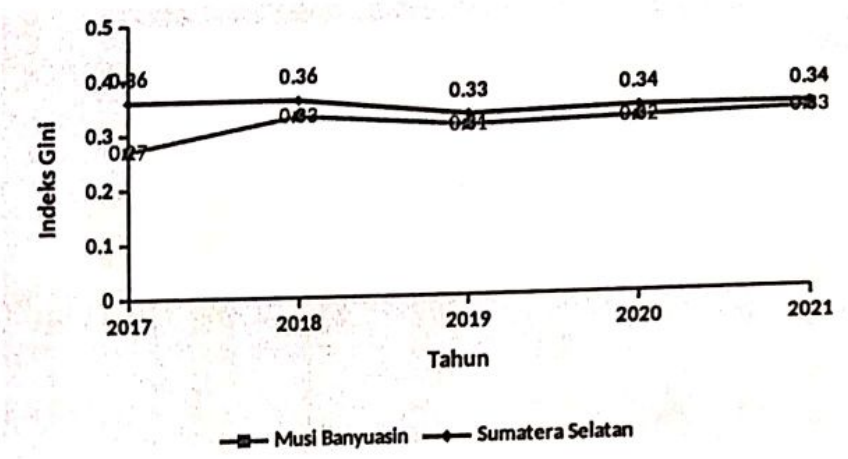

Sumber : BPS, 2022.

Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 termasuk ke dalam kategori ketimpangan moderat.

Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan cenderung menurun dari tahun 2017 senilai 0,36 menjadi 0,34 pada tahun 2021. Sedangkan Indeks Gini Kabupaten

Musi Banyuasin cenderung meningkat dari 0,27 pada tahun 2017 menjadi 0,33 pada tahun 2021. Namun demikian, dari Gambar diatas terlihat bahwa Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin masih selalu di bawah Provinsi Sumatera Selatan atau dengan kata lain distribusi pendapatan penduduk Musi Banyuasin lebih merata.

Perbandingan Indeks Gini dengan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

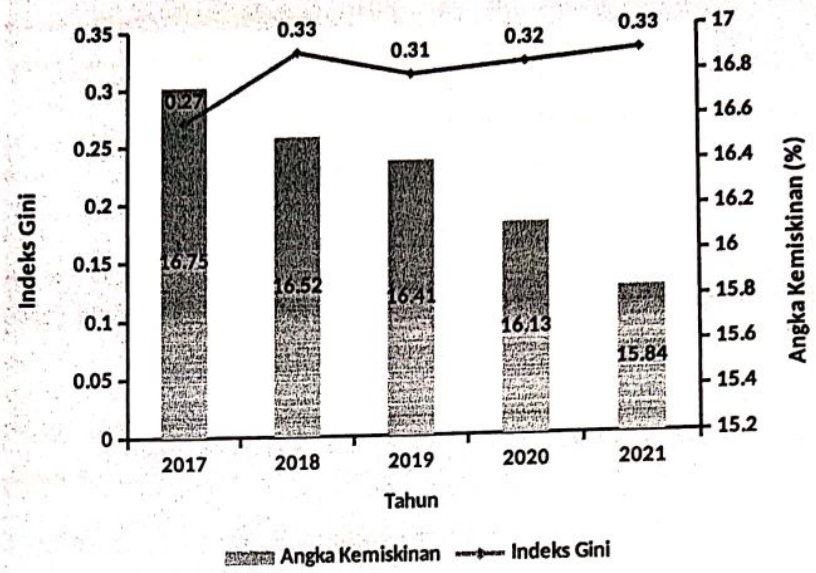

Sumber : BPS, 2022.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin yang terus menurun persentase jumlahnya berbanding terbalik dengan indeks gini yang cenderung terus meningkat nilainya atau dengan kata lain distribusi pendapatan penduduk semakin tidak merata (timpang). Semakin rendah persentase penduduk miskin di Musi Banyuasin, ketimpangan cenderung sedikit melebar.

5) **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita yang telah disesuaikan. IPM yang meningkat juga ditunjang dari seluruh variable pokok pembentuk IPM yang juga meningkat. Adapun capaian masing-masing variabel pokok IPM Kab. Muba sebagai berikut.

Capaian Variabel Pokok IPM
Kab. Muba Tahun 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)						
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,96	67,57	67,83	67,69	68,10	68,60

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,14	68,33	68,54	68,75	68,84	69,19
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,59	7,60	7,61	7,62	7,63	7,65
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,97	11,98	11,99	12,00	12,29	12,30
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	9.705	10.212	10.364	10.088	10.140	10.453

Sumber : BPS, 2022.

Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus memperlihatkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat pada grafik perkembangan di bawah ini. Dalam kurun waktu tahun 2017-2022, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin walaupun masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan. Untuk tahun 2017 capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 66,96 dan terus meningkat menjadi 68,60 pada tahun 2022.

Perkembangan IPM Musi Banyuasin telah mengalami peningkatan dalam waktu sebelas tahun terakhir tetapi apabila dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022, Kabupaten Musi Banyuasin masih menempati urutan ke-8 untuk pencapaian IPM pada tahun 2022. Perlu upaya yang maksimal untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Muba dan Sumsel Periode 2017-2022

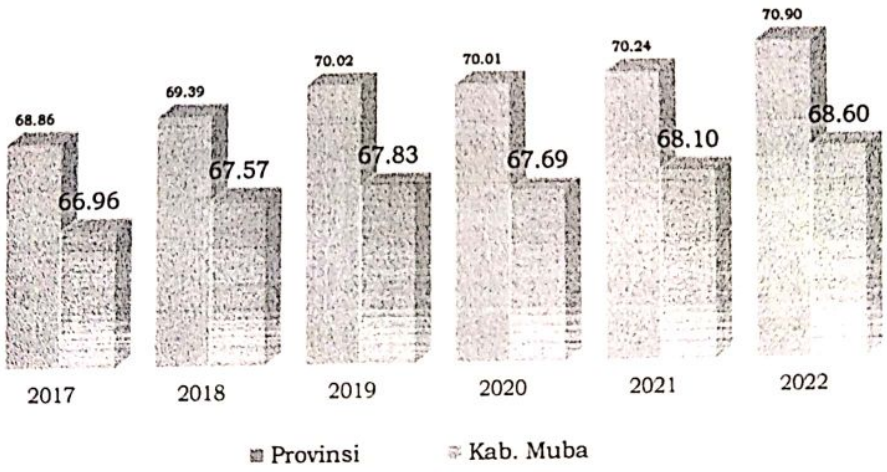

Sumber : BPS, 2022

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM	
		2021	2022
1	Palembang	78,72	79,47
2	Lubuk Linggau	74,89	75,53
3	Prabumulih	74,67	75,52
4	Ogan Komering Ulu	69,6	70,24
5	Ogan Komering Ulu Timur	69,58	70,23
6	Muara Enim	68,86	69,43
7	Pagar Alam	68,68	69,60
8	**Musi Banyuasin**	**68,10**	**68,60**
9	Lahat	67,58	68,40
11	Ogan Ilir	67,17	67,96
10	Ogan Komering Ilir	67,17	68,02
13	Musi Rawas	67,01	67,78
12	Banyuasin	67,13	67,93
14	Ogan Komering Ulu Selatan	65,34	65,87
15	Empat Lawang	65,39	66,00
17	PALI	64,88	65,75
16	Musi Rawas Utara	64,93	65,74
	Sumatera Selatan	**70,24**	**70,90**

Sumber : BPS, 2022

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Hal ini mengakibatkan pentingnya penyediaan lapangan kerja utamanya untuk generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin.

Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif dengan persentase lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada pada tahun 2017 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Muba berada pada 2,75% masih dibawah provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,39%. Pada tahun 2018, angka pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 3,29% yang berbanding lurus dengan peningkatan angka pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang sama. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Muba mengalami peningkatan menjadi 4,15% dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,79 sebagai salah satu dampak dari kondisi pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,99% lebih rendah dibandingkan Provinsi dan Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Dan pada tahun 2022 tingkat pengangguran menjadi 4,40 walaupun masih dibawah Provinsi Sumatera Selatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel Periode 2017-2022 (%)

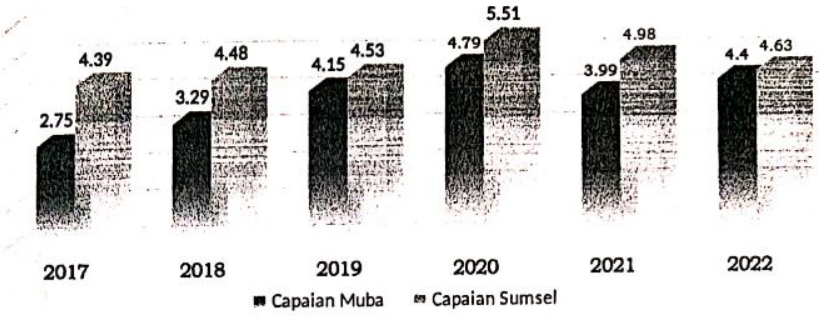

Sumber : BPS, 2022

7) Inflasi

Secara umum tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa lebih dikenal dengan istilah inflasi. *Supply* barang dan jasa yang berkurang sementara *demand* tetap atau meningkat dapat menyebabkan inflasi.

Secara umum, tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai kelompok komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan kelompok pendidikan dan kelompok transportasi.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan, perhitungan inflasi hanya dilihat dari perkembangan harga di 2 kota yaitu Palembang dan Lubuk Linggau.

Perbandingan Tingkat Inflasi Sumsel dan Nasional Periode 2014-2022* (%)

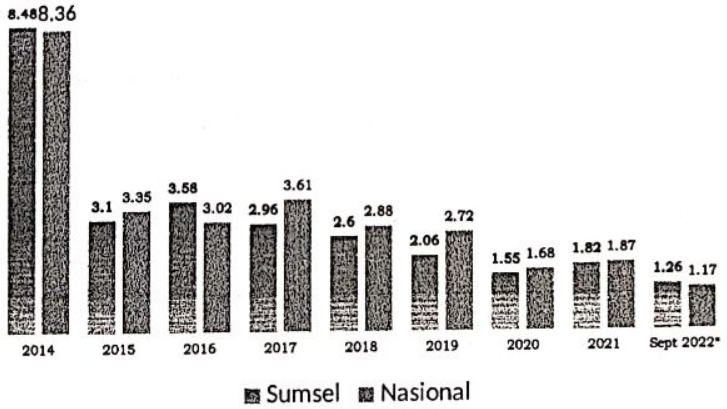

Sumber : BPS, 2022. Diolah

Gabungan 2 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,26 persen, Inflasi Tahun Kalender 2022 (kumulatif) sampai bulan September 2022 sebesar 5,60 persen. Inflasi Tahunan "Year on Year" (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 6,70 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Komoditas dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan September 2022 di Sumatera Selatan, yaitu: bensin, beras, tarif kendaraan roda 2 online, solar dan angkutan dalam kota mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata harga bulan Agustus 2022. Kota Palembang pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,28 persen, Inflasi Tahun Kalender 2022 (kumulatif) bulan Januari sampai September 2022 sebesar 5,61 persen.

Inflasi Tahunan "Year on Year" (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 6,72 persen. Kota Lubuk Linggau pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,04 persen, Inflasi Tahun Kalender 2022 (kumulatif) bulan Januari sampai September 2022 sebesar 5,50 persen. Inflasi Tahunan "Year on Year" (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 6,50 persen.

8) **Standar Pelayanan Maksimal (SPM)**

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021 sebagai berikut:

A. Urusan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,04%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,54%
3. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**100,29%**
4. Pelayanan Kesehatan Balita	95,61%
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	94,49%
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	98,85%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	98,00%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99,70%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	98,63%
10. Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	97,60%
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	94,55%
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	92,29%

B. Urusan Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

1. Pendidikan Anak Usia Dini	83,07%
2. Pendidikan Dasar	82,33%
3. Pendidikan Kesetaraan	90,46%

C. Urusan Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100,00%

D. Urusan Trantibum Linmas

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	97,00%

E. Urusan Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	62,50 %
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yg Terkena Relokasi Program Pemeritah Daerah Kab/Kota	83,33%

F. Urusan Pekerjaan Umum

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	87,94%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	81,03%

III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat dan isu strategis aktual serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. TUJUAN PEMBANGUNAN

1) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Angka Kemiskinan
- Indeks Gini
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Pertumbuhan Ekonomi
- Indeks Pelayanan Infrastruktur

2) Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

- Indeks Pembangunan Manusia

3) **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi

b. **SASARAN PEMBANGUNAN**

(1) **Peningkatan Daya Beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Pengeluaran per kapita

(2) **Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

(3) **Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)

(4) **Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha, Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)
- Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)
- Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)

(5) **Peningkatan Kesejahteraan Para Petani**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Nilai Tukar Petani

(6) **Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih
- Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak
- Persentase Kawasan Kumuh Tertangani

(7) **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(8) **Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

(9) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Usia Harapan Hidup (UHH)

(10) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- Opini BPK RI Terhadap LKPD

(11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

IV. ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

a. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024

Ada 5 (lima) isu strategis yang diangkat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu :

1. Penurunan ketimpangan antar wilayah;
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
5. Pemanfaatan ruang.

Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 memiliki isu strategis daerah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 ;
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum ;
3. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting ;
4. Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital ;
5. Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan;
6. Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumatera Selatan;
7. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan;
8. Pengeloaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana.

Memperhatikan gambaran kondisi Daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional termasuk dampak dari pandemi *Covid-19*, maka **isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian dan Pelayanan Dasar ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

5. Pelestarian Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana;
6. Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
7. PILKADA Serentak Tahun 2024.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Lokal;
3. Pemenuhan Fasilitasi Sarana Prasarana Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan;
4. Optimalisasi Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Diversifikasi Ekonomi;
5. Percepatan Legalitas Kepemilikan Lahan Petani;
6. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Prioritas;
7. Pemenuhan Kebutuhan RTH Perkotaan di setiap Kecamatan;
8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pada Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar Berbasis Satu Data Muba;
9. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik disertai Percepatan Implementasi Satu Data Muba;
10. Penyederhanaan Birokrasi Layanan Publik.

c. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

1. Memperhatikan 5 (lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang disebut Prioritas Nasional sebagai berikut:
   a. <u>Arahan Presiden</u>
      (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industry dan talenta global;
      (2) Pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
      (3) Penyederhanaan Regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
      (4) Penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang serta menyederhanakan eselonisasi;
      (5) Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

b. Arahan Presiden tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional meliputi:
   (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
   (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
   (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
   (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
   (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
   (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
   Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2024 diarahkan pada:
   (1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum;
   (2) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
   (3) Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan;
   (4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

3. Memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2024 serta isu strategis, maka tema pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 diarahkan pada **"Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan".** Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2024 tersebut, maka ditetapkan **6 (enam) Prioritas Daerah dan 23 (dua puluh tiga) Program Prioritas Daerah** sebagai berikut:

PRIORITAS DAERAH 1 (PD 1) :
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI KOMODITAS UNGGULAN UNTUK MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan legalitas kepemilikan lahan petani;
PPD 2 : Peningkatan produktivitas serta kualitas komoditas untuk Pemenuhan kebutuhan domestik dan hilirisasi;
PPD 3 : Optimalisasi pengembangan UMKM dan IKM;
PPD 4 : Peningkatan investasi dengan menjaga iklim investasi yang Kondusif serta promosi investasi yang efektif dan tepat sasaran.

PRIORITAS DAERAH 2 (PD 2) :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT UNTUK MENURUNKAN KEMISKINAN EKSTREM

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Penguatan perlindungan sosial;
PPD 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
PPD 3 : Pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui akses Pelayanan dasar.

PRIORITAS DAERAH 3 (PD 3) :
MENINGKATKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan konektivitas pada daerah sentra ekonomi;
PPD 2 : Pembangunan dan peningkatan SPAM ;
PPD 3 : Pembangunan dan peningkatan system pengelolaan air limbah domestik;
PPD 4 : Peningkatan dan pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman;
PPD 5 : Peningkatan dan pengamanan sumber daya air.

PRIORITAS DAERAH 4 (PD 4) :
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan;
PPD 2 : Pencegahan kebakaran hutan;
PPD 3 : Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan;
PPD 4 : Penanggulangan bencana.

PRIORITAS DAERAH 5 (PD 5) :
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan pelayanan Pendidikan yang berkualitas;
PPD 2 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
PPD 3 : Peningkatan peran generasi muda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
PPD 4 : Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga Kerja lokal.

PRIORITAS DAERAH 6 (PD 6) :
TRANSFORMASI DIGITAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Prioritas Daerah (PPD) :

PPD 1 : Peningkatan pelayanan publik berbasis digital;
PPD 2 : Peningkatan manajemen kinerja ASN dan akuntabilitas;
PPD 3 : Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca Konflik.

d. Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2024

Adapun target sasaran indikator makro pembangunan Tahun 2024 yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain meliputi:

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,00 – 4,50
b. Angka Kemiskinan sebesar 14,35
c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,65
d. Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 69,71
e. Indeks Gini sebesar 0,296

V. KAMUS USULAN MASYARAKAT

Kamus usulan merupakan komponen data wajib dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai panduan/guidance bagi masyarakat dan Anggota DPRD dalam menyampaikan Usulan dan Pokok-Pokok Pikiran melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

SIPD. Kamus usulan dimaksud dalam penyusunannya sudah selaras dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta telah dipetakan ke dalam Prioritas Daerah, Program Prioritas Daerah, Bidang Urusan, Program Nomenklatur dan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Kamus Usulan untuk SIPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 2 dalam Surat Edaran ini.

VI. TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

Tahapan dan jadwal penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 direncanakan sebagai berikut:

TAHAPAN	JADWAL
1. Rancangan Awal RKPD a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD b. Penyampaian Arah Kebijakan	 Minggu IV Desember 2022 Minggu I Januari 2023
2. Rancangan Awal Renja-PD : a. Penyusunan Ranwal Renja-PD b. Verifikasi dan Asistensi Ranwal Renja-PD dengan Mitra Bappeda c. Input hasil verifikasi Ranwal Renja-PD ke SIPD	 Minggu II – III Januari 2023 Minggu III - IV Januari 2023 Minggu I Februari 2023
3. Musrenbang Desa/Kelurahan (Termasuk Input Usulan Desa/Kelurahan ke SIPD dan Verifikasi Bidang Mitra Bappeda)	Minggu III – IV Januari 2023
4. Musrenbang Kecamatan (Termasuk Verifikasi Kecamatan Terhadap Usulan Desa/Kelurahan di SIPD sesuai hasil Musrenbang Kecamatan)	Minggu IV Jan – II Feb 2023
5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD a. Input Pokok-pokok Pikiran DPRD di SIPD b. Verifikasi Setwan dan Telaah Bidang Mitra Bappeda di SIPD	 Minggu I Jan - IV Feb 2023 Minggu I Jan - IV Feb 2023
6. Forum Perangkat Daerah (Termasuk Verifikasi hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD oleh PD)	Minggu III – IV Februari 2023
7. Musrenbang RKPD Kabupaten (Termasuk Verifikasi hasil Musenbang Kecamatan dan Pokir DPRD oleh TAPD-Perencanaan)	Minggu I-II Maret 2023
8. Musrenbang RKPD Provinsi	April 2023
9. Musrenbang RKP Nasional	April 2023
10. Penyusunan rancangan akhir RKPD dan Renja-PD	Paling lambat Minggu IV April 2023
11. Review APIP dan Fasilitasi Prov thd Ranhir RKPD	Paling lambat Minggu II Mei 2023
12. Penetapan RKPD dan Renja-PD	Minggu III- IV Juni 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

VII. LAIN-LAIN

Perencanaan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan Perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan semua aspek dan memperhatikan semua masukan dari para pemangku kepentingan, serta menganalisis capaian pembangunan tahun sebelumnya berikut perkembangan kondisi makro daerah, seharusnya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Konsistensi untuk mengimplementasikan perencanaan, menjadi kunci penting untuk mencapai target-target yang telah disepakati. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya secara optimal untuk menjaga konsistensi perencanaan dengan implementasi. Hal ini untuk menjaga agar target-target pembangunan dapat tercapai.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 ini akan menjadi panduan awal dalam rangka pencapaian hal-hal tersebut. Untuk itulah diperlukan komitmen bersama, kerja keras dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar apa yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dapat terwujud

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Lampiran 2 : Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin
Nomor : B-050/1641/SETDA/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

KAMUS USULAN MASYARAKAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
1	2	3	4	5
PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Penambahan Ruang Kelas Baru - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Ruang Kelas - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Mebeluer Sekolah - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Perlengkapan Siswa - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - SD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Penambahan Ruang Kelas Baru - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Laboratorium - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Gedung Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Ruang Guru Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Laboratorium - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Mebeluer Sekolah - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Perlengkapan Siswa - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - SMP	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru - PAUD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru - PAUD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - PAUD	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Mebeluer Pendidikan - Nonformal/Kesetaraan	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan - Nonformal/Kesetaraan	Dinas Dikbud	PD5 - PPD1
KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Pembangunan Puskesmas Pembantu	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Rehabilitasi Rumah Sakit	Dinas	PD5 - PPD2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
			Kesehatan	
		Rehabilitasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Pengadaan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
		Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	PD5 - PPD2
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Unit Air Baku	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan *Breakwater*	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Unit Air Baku	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi *Breakwater*	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Revitalisasi Danau	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Normalisasi Sungai	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Dinas PUPR	PD3 - PPD5
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
		Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perkim	PD3 - PPD2
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1
		Penyediaan Sarana Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Perkim	PD3 - PPD3
		Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Perkim	PD3 - PPD3
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Perkim	PD3 - PPD3
		Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Perkim	PD3 - PPD3
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dinas Perkim	PD3 - PPD5
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dinas Perkim	PD3 - PPD5
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dinas Perkim	PD3 - PPD5
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Dinas Perkim	PD3 - PPD5
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan Bangunan Gedung	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
		Rehabilitasi Bangunan Gedung	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembebasan Lahan untuk Jalan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Pembangunan Jalan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Rehabilitasi Jalan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Pembangunan Jembatan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Rehabilitasi Jembatan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
		Pembangunan Rumah untuk Relokasi terdampak Program Kabupaten/Kota	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
		Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Kurang Mampu	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
		Pembangunan Rumah Relokasi untuk penanganan permukiman kumuh	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan/Permukiman	Dinas Perkim	PD3 - PPD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatPol PP	PD3 - PPD4
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	PD4 - PPD3
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SatPol PP	PD4 - PPD2
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	SatPol PP	PD4 - PPD4
SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas	Dinas Sosial	PD2 - PPD1
		Penyediaan Sarana KUBE dan UEP	Dinas Sosial	PD2 - PPD3
		Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	PD2 - PPD1
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinas Sosial	PD4 - PPD4
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	DPPPA	PD5 - PPD3
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Penyediaan Sarana Bermain Ramah Anak	DPPPA	PD5 - PPD3
PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	PD2 - PPD4
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dinas Ketahanan Pangan	PD2 - PPD4
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	PD2 - PPD4
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Pekarangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	PD2 - PPD2
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan/Adat	DPMD	PD6 - PPD3
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKB	PD5 - PPD2
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DPPKB	PD5 - PPD2
PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pembangunan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
		Pembangunan Prasarana Jalan (Kebinamargaan)	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Penyediaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
		Rehabilitasi Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
		Rehabilitasi Prasarana Jalan (Kebinamargaan)	Dinas PUPR	PD3 - PPD1
		Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
		Pembangunan Gedung Terminal	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
		Rehabilitasi Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	PD3 - PPD1
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyediaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO	PD6 - PPD1
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perkoperasian	Dinas Koperasi & UMKM	PD1 - PPD3
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi & UMKM	PD1 - PPD3
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	DISPOPAR	PD5 - PPD2
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISPOPAR	PD5 - PPD2
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	DISPOPAR	PD5 - PPD2
KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan	Dinas Dikbud	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pemugaran Cagar Budaya	Dinas Dikbud	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Dikbud	PD6 - PPD1
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Dikbud	PD6 - PPD1
PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Penyediaan Sarana Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	PD5 - PPD1
		Pembangunan Prasarana Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	PD5 - PPD1
KELAUATAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	PD1 - PPD2
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	PD1 - PPD2
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	PD1 - PPD2
PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	DISPOPAR	PD5 - PPD2
PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Penyediaan Pakan Ternak	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Penyediaan Sarana Pertanian	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Penyediaan Sarana Perkebunan	Dinas Perkebunan	PD1 - PPD2
		Penyediaan Alat Mesin Pertanian	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
	PROGRAM	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas TPHP	PD1 - PPD2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
		(Pertanian)		
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Embung Pertanian	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan DAM Parit	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Long Storage	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Pintu Air (Pertanian)	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Rumah Potong Hewan	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Balai Penyuluh di Kecamatan	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Pembangunan Prasarana Perkebunan Lainnya	Dinas Perkebunan	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Pertanian)	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Embung Pertanian	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi DAM Parit	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Long Storage	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Pintu Air (Pertanian)	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Rumah Potong Hewan	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Balai Penyuluh di Kecamatan	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
		Rehabilitasi Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas TPHP	PD1 - PPD2
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Komoditas Perkebunan	Dinas Perkebunan	PD1 - PPD2
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Fasilitasi Sertifikasi Lahan dan Izin Usaha Pertanian	Dinas Perkebunan	PD1 - PPD1
PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdagperin	PD1 - PPD3
KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan (Padat Karya)	Semua Kecamatan	PD2 - PPD2
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Semua Kecamatan	PD2 - PPD2
PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dinas Perkim	PD3 - PPD4
LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	PD4 - PPD1
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM / ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Kendaraan Penunjang Aktivitas Sosial Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	PD6 - PPD3
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembinaan Mental Spritual Masyarakat (Keagamaan)	Sekretariat Daerah	PD6 - PPD3
TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Pendidikan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi	PD5 - PPD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Isu / Bidang Urusan	Program	Usulan / Permasalahan	Perangkat Daerah Tujuan Usulan	Prioritas Daerah
	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner